

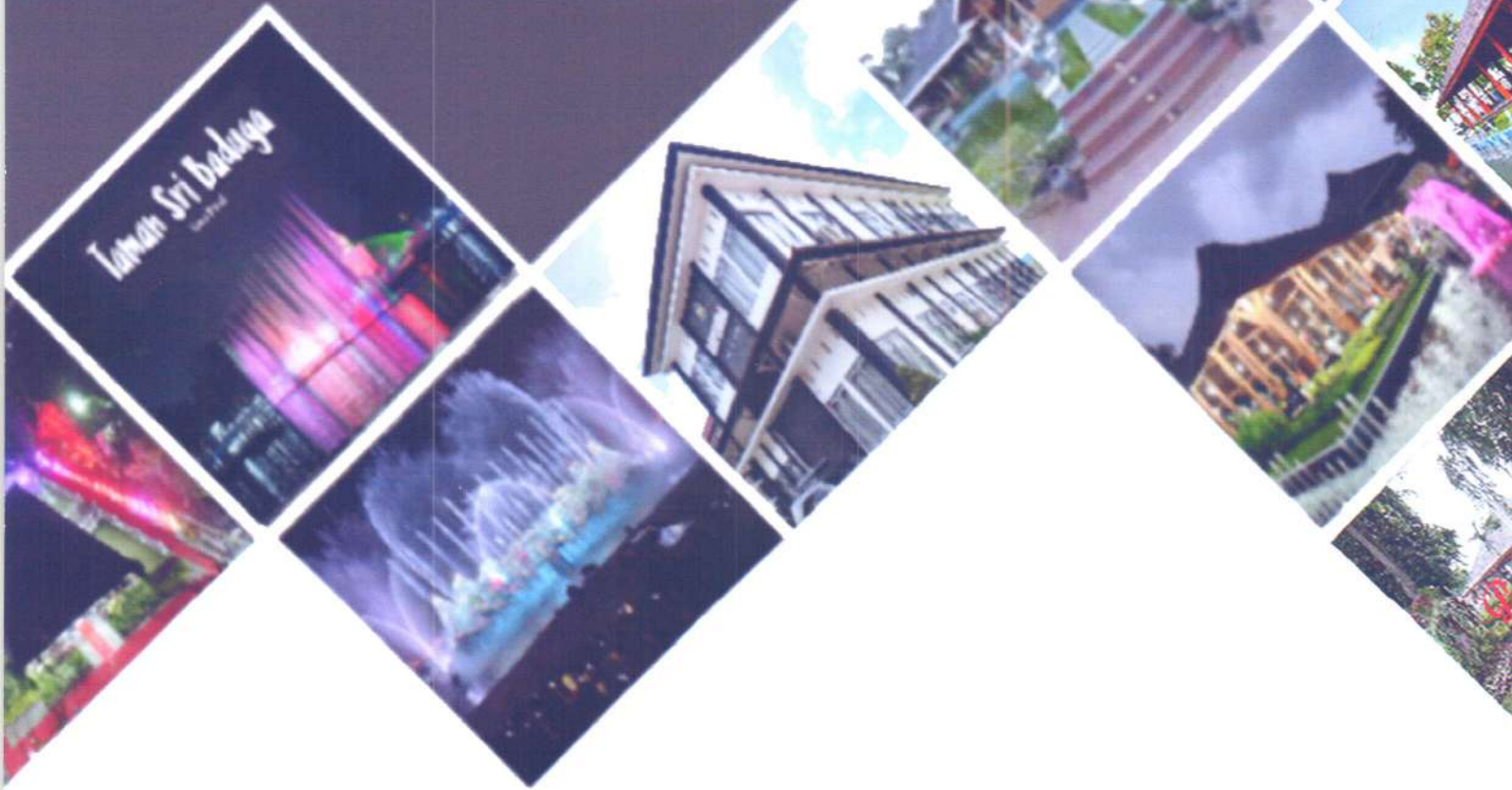


BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Surawinata No. 30A Purwakarta Kode Pos 41114

Telepon (0264) 8641535

e-mail ; bapenda@purwakartakab.gp.id



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah telah disusun visi, misi, tujuan dan strategi untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang diwujudkan dalam program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun.

Renstra ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang

Demikian Restra yang kami buat, semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good govenance*).

Purwakarta, April 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA




Hji. NINA HERLINA, S.Sos

NIP. 19690101 19950 2 003



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	8
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	14
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	19
3.2 Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	27
4.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah	27



	4.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran, Strategi dan Kebijakan	28
BAB V	RENCANA PROGRAM INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	32
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	37
BAB VII	PENUTUP	38



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan lainnya yang mengatur Otonomi Daerah maka peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik akan lebih besar. Hal ini memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan yang melibatkan semua stakeholders dalam setiap tahapan.

Proses perencanaan merupakan hal yang penting bagi proses pembangunan, hal ini dapat dijadikan sebagai arah dan tujuan bagi Pemerintah Daerah didalam menjalankan proses pembangunannya. selain itu proses perencanaan dapat dijadikan pedoman didalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa datang.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Mekanisme perencanaan strategis yang ditempuh yaitu melalui pembahasan dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di lingkungan



BAPENDA Kabupaten Purwakarta dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, evaluasi/pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra BAPENDA Kabupaten Purwakarta merupakan suatu keputusan mendasar sebagai acuan operasional program kegiatan dalam mencapai tujuan, untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan adopsi langsung dari komitmen Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023.

Melalui penetapan Visi: ***"Melanjutkan Purwakarta Istimewa"*** dan Misi:

- 1) ***Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,***
- 2) ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,***
- 3) ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, dan***
- 4) ***Mengembangkan perekonomian rakyat berbasis desa.***

1.2 Landasan Hukum

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 103.A Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul



sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Purwakarta serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan pertanggung jawaban Bupati selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sangat erat hubungannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yakni Pembangunan yang dilaksanakan dengan Visi: **PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH** serta Misi:

1. meningkatkan kualitas SDM yang berpendidikan dan berakhlakul karimah;
2. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
3. meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal;
4. meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penataan wilayah; dan
5. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut unsur ketersediaan dana sangat menentukan dalam upaya pencapaiannya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu unsur Pemerintah yang



bertanggung jawab dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta dalam mendukung upaya terciptanya Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang cerdas, sehat dan berakhlakul karimah. yang tertuang baik pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi Kebijakan SKPD

5. BAB V RENCANA PROGRAM INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, indikator sasaran, dan pendanaan indikatif)

6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan pendapatan daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi dokumen Badan dan kearsipan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Badan;



- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pendapatan I, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (L.P.A.D.S) dan pembinaan retribusi daerah.

Bidang Pendapatan I mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis operasionallingkup bidang kerja pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, dan air tanah;
- b. pengelolaan dan pelayanan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan dan air tanah;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, air tanah dan pembinaan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan I membawahkan:

- Sub Bidang Penggalian Potensi;
- Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

4. Bidang Pendapatan II, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan



Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu meliputi kegiatan pendataan dan penilaian, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan dan penetapan.

Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perpajakan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan II membawahkan:

- Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
 - Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
5. Bidang Penagihan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di Bidang Penagihan pengelolaan pajak dan pendapatan daerah lainnya.

Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penagihan pengelolaan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Penagihan pengelolaan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penagihan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan



- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan membawahkan:

- Sub Bidang Penagihan
- Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan
- Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan



2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta didukung oleh 108 (seratus delapan) orang pegawai, yang terdiri dari: PNS = 65 (enam puluh lima) orang dan TKK = 43 (empat puluh tiga) orang.

Baik buruknya suatu organisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia, untuk itu dalam rangka menjalankan Visi dan Misinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta didukung oleh pegawai yang terdiri atas PNS (Gol I s/d IV) dan TKK. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN	
			PANGKAT / GOL	JUMLAH (Orang)
1	PNS	65	Pembina Utama Muda / IV c	1
			Pembina Tk I / IV b	0
			Pembina / IVa	3
			Penata Tk I / III d	7
			Penata / III c	12
			Penata Muda Tk I / III b	9
			Penata Muda / III a	3
			Pengatur Tk I / II d	5
			Pengatur / II c	20
			Pengatur Muda Tk I / II b	1
			Pengatur Muda / II a	4
			Juru Tk I / Id	0
			Juru / I c	0
			Juru Muda Tk I / Ib	0
Juru Muda / Ia	0			
2	TKK	43	-	43
JUMLAH TOTAL				108

Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JUMLAH
1	II.B	1
2	III.A	1
3	III.B	3
4	IV.A	11
JUMLAH TOTAL		16

Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN	
		L	P
1	PNS	49	16
2	TKK	30	13
JUMLAH		72	29

Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

NO	URAIAN	USIA	JUMLAH
1	PNS	25-30	0
		31-35	10
		36-40	19
		41-45	12
		46-50	10
		51-55	12
		56-58	2



2	TKK	15-20	1
		20-25	2
		25-30	20
		31-35	4
		36-40	10
		41-45	4
		46-50	1
		51-55	0
		56-58	1
JUMLAH TOTAL			108

Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta didukung oleh Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas:

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan								
			S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	PNS	65	3	29	-	5	-	2	26	-	-
2	TKK	43	-	17	-	5	-	-	18	3	-
Jumlah		108	3	46	-	10	-	2	44	3	-

Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

2.2.2 Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai



seperti gedung yang cukup representatif, tersedianya kendaraan operasional baik roda 4, roda 2, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai.

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.3.1 Tantangan

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak;
- c. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga;
- d. Sering berubahnya Peraturan Pusat/Daerah menyulitkan aparat dalam melaksanakan tugas; dan
- e. Kurang koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak.

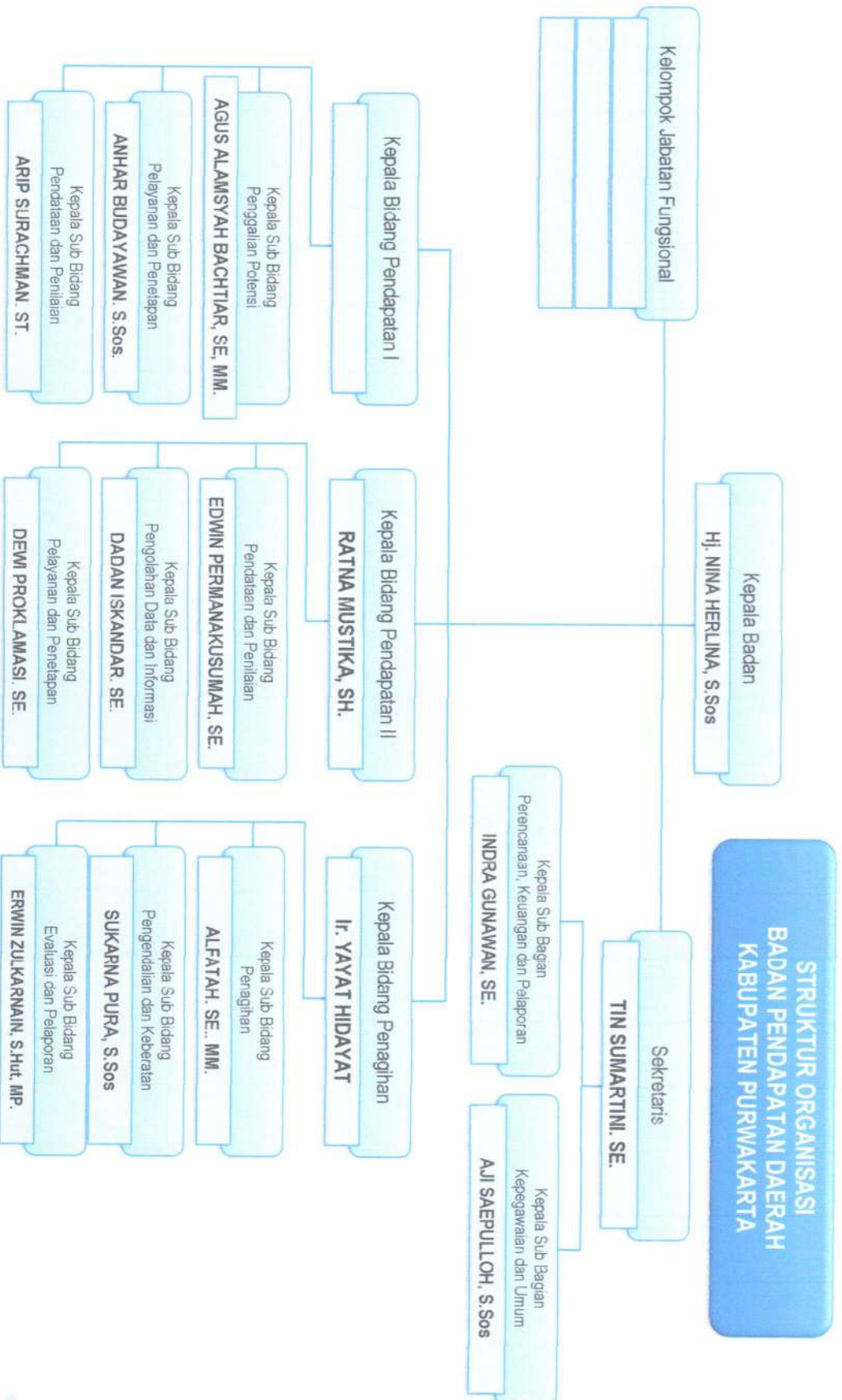
2.3.2 Peluang

- a. Sebagai Kabupaten yang dekat dengan ibukota Jakarta, potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka;
- b. Berkembangnya investasi dan kunjungan wisata ke Kabupaten Purwakarta memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada, maka faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dirumuskan sebagai berikut:



1. Adanya peningkatan profesionalisme SDM untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Adanya optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Adanya pemberdayaan SDM dan optimalisasi koordinasi internal untuk memupuk kepercayaan masyarakat;
4. Adanya optimalisasi penggunaan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pemungutan pajak dari WP yang sudah ada;
5. Adanya kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi pemungutan Pajak terhadap WP baru.





BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

3.1.1 Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi:

- a. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagai koordinator unit pemungut dalam menghimpun Pendapatan Daerah.
- b. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan Visi, Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- c. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah secara baik dan inovatif.



Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- a. Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia selaku penyelenggara fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
- b. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar SKPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah yang benar benar akurat, teruji serta terintegrasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal

3.1.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, antara lain:

- a. Sebagai daerah yang dekat dengan ibukota Jakarta, potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka;
- b. Berkembangnya investasi dan kunjungan wisata ke Kabupaten Purwakarta berpotensi pada peningkatan pendapatan daerah.
- c. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, adalah:


- a. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
- b. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.



- c. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan Pajak Daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, tugas tugas dan fungsinya meliputi:

TUGAS POKOK		FUNGSI
Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan terkait pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah		<ol style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dane. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah yang menetapkan RPJMD Pemerintah



Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023, Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu **"Mewujudkan Purwakarta Istimewa"**. Dan untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social;
- b. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
- c. mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, dan
- d. mengembangkan perekonomian rakyat berbasis desa.

Dengan memperhatikan rangkaian visi dan misi Kepala Daerah di atas, serta dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut:

- a. Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda pembangunan daerah;
- b. Secara teknis, peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi kedua: "meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional".

Dalam menjalankan relevansi hubungan antara Badan Pendapatan Daerah dan Visi, Misi, Kepala Daerah hingga program-program operasional dalam RPJMD yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, akan dipengaruhi oleh 2 faktor penentu yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Kedua faktor tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 3.1

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	Misi: 2 meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Belum adanya SAB dalam mendukung yang baik, telah menjadikan kebijakan alokasi berdasarkan pagu yang tersedia	Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan	Telah terdapat kebijakan SPM, SOP dan SP & pedoman standar biaya belanja daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum adanya standarisasi sarana dan prasarana	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya web site	Adanya komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi penyelenggara layanan pendapatan belum terstandarisasi	Belum dibuat Standar baku kompetensi SDM Bapenda	Adanya Penilaian IKM dan Peningkatan kualitas yang baik secara



NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
				nasional
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan LAKIP kurang ditunjang oleh ketegasan rencana kinerja, yang masih memuat ketidakjelasan indikator kinerja dan duplikasi program kegiatan penunjangnya sehingga berdampak pada penilaian LAKIP oleh Instansi Pembina	Penyusunan Renstra dan Renja belum sejalan dengan Pedoman SAKIP dan Renstra baku	Telah Diterbitkannya Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



3.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional maupun regional.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis tersebut, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Purwakarta, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2023.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

- a. Transparansi informasi disertai pemanfaatan Tehnologi Informasi di berbagai aspek;
- b. Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan yang semakin terukur dan terstandarisasi;
- c. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
- d. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip



transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;

- e. Kuantitas dan kualifikasi SDM perpajakan belum memadai;
- f. Penataan kelembagaan yang mengacu pada pelayanan prima;
- g. Belum ada standarisasi sarana dan prasarana; dan
- h. Belum optimalnya engelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki Visi: **“Menjadi Institusi Pengelola Pendapatan Daerah yang Bersih dan Profesional dalam Rangka Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**.

Dari Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki makna bahwa:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Institusi pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dengan Peraturan Daerah tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mengarah pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan profesional.
2. Sebagai koordinator dalam pemungutan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta harus mampu melayani dan berkerja secara profesional, selain itu sebagai perencana dan penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta harus mampu menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah, sebagai upaya mewujudkan Purwakarta Istimewa.



Misi Pertama :

Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pelayanan pajak daerah.

Misi ini mengandung makna bahwa sebagai koordinator pendapatan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta harus mampu melakukan koordinasi secara baik dengan instansi terkait dan menggugah kesadaran masyarakat selaku Wajib Pajak Daerah dalam membayar pajak.

Misi Kedua :

Meningkatkan transparansi dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan pajak daerah.

Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka meningkatkan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta harus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang mudah, nyaman dan cepat serta transparan dengan didukung sistem teknologi informasi yang handal.

4.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mengarahkan Visi dan Misi berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka secara operasional perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran serta strategi yang meliputi kebijakan dan program.

Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi. Tujuan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.



Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan.

Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas. Berorientasi pada hasil (*outcome*) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien dari isu-isu strategis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) berupa serangkaian kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya.

Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan cara mencapainya (Kebijakan dan Program) yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, diuraikan sebagai berikut:

Misi Pertama:

Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah.

Tujuan:

Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah, dengan indikator kinerja tujuan: penerimaan pajak daerah.

Sasaran:

Tercapainya Target Semua Jenis Pendapatan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja sasaran:

1. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD);



2. Nilai Pendapatan Pajak Daerah;

Strategi:

Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah melalui:

1. Penjaringan WP Baru;
2. Sosialisasi;
3. Pendataan WP;
4. Penagihan;
5. Pemeriksaan; dan
6. Kordinasi.

Program:

1. Program Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB
2. Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB
3. Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah

Misi Kedua:

Meningkatkan transparansi dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan pajak daerah.

Tujuan:

Meningkatnya kualitas pelayanan prima dalam pelayanan pajak daerah, dengan indikator kinerja tujuan: Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran:

Meningkatnya kepuasan masyarakat selaku wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah, dengan indikator kinerja sasaran:

1. Masyarakat selaku wajib pajak yang puas terhadap pelayanan pajak daerah;
2. Tindak lanjut pengaduan masyarakat selaku wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah.



Strategi:

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat selaku wajib pajak secara reguler;
2. Membuat SOP sesuai kebutuhan.

Program:

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dinas

RENCANA STRATEGIS 2018-2023
MATRIK TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Visi: Menjadi Institusi Pengelola Pendapatan Daerah yang Bersih dan Profesional dalam Rangka Melanjutkan Purwakarta Istimewa

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Tujuan Akhir Renstra	SASARAN					Strategi	Arah Kebijakan										
				Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal			Capaian Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir						
Misi 1 : Meningkatkan Partisipasi dan Kepatuhan Masyarakat dalam Pelayanan Pajak Daerah				2019	2020	2021	2022	2023												
1	Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah	Penerimaan pajak daerah	72,50	1	Tercapainya target penerimaan semua jenis pendapatan pajak daerah	1	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD)	%	Jumlah Pajak daerah dibagi Jumlah PAD dikali 100%	60,00	62,50	65,00	70,00	72,50	72,50	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui: - Penjarangan WP baru - Sosialisasi - Pendataan WP - Penagihan - Pemeriksaan - Koordinasi				
			20,00	2	Persentase Asli daerah terhadap Pendapatan Daerah	2	Persentase Asli daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan Daerah dikali 100%	17,87	19,00	19,25	19,50	20,00	20,00					
Misi 2 : Meningkatkan Transparansi dan Profesionalisme Aparatur dalam Pelayanan Pajak Daerah																				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima dalam pelayanan pajak daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	70,00	1	Meningkatnya kepuasan WP dalam pelayanan pajak daerah	1	WP yang puas terhadap pelayanan pajak daerah	Nilai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,00	76,00	76,00	77,00	78,00	78,00	Melakukan Survey Kepuasan WP secara reguler				
			100,00	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2	Tindak lanjut Pengaduan WP dalam pelayanan pajak daerah	%	Prosentase pengaduan WP yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan WP yang diterima dikali 100%	80,00	85,00	95,00	100,00	100,00	100,00	Membuat SOP sesuai kebutuhan				
			80,00	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	Hasil Evaluasi Inspektorat	0,00	55,00	60,00	70,00	80,00	80,00					
			100,00	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2	Tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota	%	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi dikali 100%	85,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00					



BAB V

RENCANA PROGRAM INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam Bab IV, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa program, antara lain:

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dinas dengan indikator kinerja program:
 - a. Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi
 - b. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana kantor
 - c. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
 - d. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran
 - e. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan
 - f. Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD

Program ini didukung dengan rencana kegiatan, antara lain:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan bahan logistik kantor
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan Jasa Tenaga PTT
- m. Festival Purwakarta Istimewa
- n. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- o. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- p. Pengadaan peralatan gedung kantor
- q. Pengadaan mebeleur
- r. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- s. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- t. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- u. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- v. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- w. Pengadaan Peralatan Pusat Data (Data Center)
- x. Pengadaan perlengkapan mesin cetak/printer
- y. Pengadaan jasa sewa gedung kantor
- z. Pengadaan Jasa Pemeliharaan LAN, Server Database dan Server Storage
- aa. Pengadaan jasa pembuatan website
- bb. Pengadaan peralatan audio visual
- cc. Penataan ruangan arsip
- dd. Pengadaan Mesin Cetak (Line Matrix Printer)
- ee. Pengadaan mesin porforasi
- ff. Penataan Tempat Parkir Motor
- gg. Penataan Emplasemen Gedung Kantor
- hh. Pengadaan Videotron



- ii. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - jj. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah
 - kk. Penataan Arsip
2. Program Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB dengan indikator kinerja program:

Program ini didukung dengan rencana kegiatan, antara lain:

- a. Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
- b. Peningkatan pengawasan potensi pajak wajib pajak daerah Non PBB dan BPHTB (Uji Petik)
- c. Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah Non PBB dan BPHTB
- d. Pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
- e. Pemutakhiran data wajib pajak daerah Non PBB dan BPHTB
- f. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMPATDA
- g. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-SPTPD
- h. Penelitian dan pemeriksaan lapangan pajak daerah Non PBB dan BPHTB
- i. Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHTB
- j. Peningkatan sarana pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHTB
- k. Pendataan objek dan subjek pajak daerah Non PBB dan BPHTB
- l. Pengadaan Aplikasi SIP MBLB
- m. Optimalisasi Peningkatan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
- n. Pengadaan Sarana Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Tapping Box)



3. Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB dengan indikator kinerja program:

Program ini didukung dengan rencana kegiatan, antara lain:

- a. Pengelolaan pelayanan PBB dan validasi BPHTB
- b. Pencetakan masal SPPT dan DHKP PBB P2
- c. Pembinaan dan sosialisasi PBB dan BPHTB
- d. Pendataan dan Penilaian Objek Pajak, Verifikasi Data dan Penelitian Lapangan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB
- e. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIP PBB
- f. Perekaman data obyek dan subyek pajak PBB P2
- g. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIP BPHTB
- h. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIP Arsip (Document Workflow) Pelayanan Pajak Daerah
- i. Pengadaan Aplikasi e-PBB
- j. Penyempurnaan ZNT / NIR PBB P2

4. Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja program:

Program ini didukung dengan rencana kegiatan, antara lain:

- a. Apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak
- b. Evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah
- c. Peningkatan Kinerja Dana Bantuan Keuangan Provinsi
- d. Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
- e. Pengendalian dan pengawasan penyebaran SKPD



- f. Pengendalian dan pengawasan pengurangan, pembatalan dan keberatan pajak daerah
- g. Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah
- h. Pengadaan Aplikasi Dashboard Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
- i. Pengendalian penerimaan pendapatan retribusi daerah

5.2 Rencana Pembiayaan

Dari uraian kegiatan di atas, masing-masing kegiatan memiliki pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta, namun besaran dari pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam APBD pada masing-masing tahun anggaran.

Adapun rencana pembiayaan dari kegiatan di atas dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022				2023	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Tujuan 1:		4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG														
Mewujudkan Manajemen Perkantoran secara optimal	Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	4.04	Keuangan														
		4.04.4.04.07	Badan Pendapatan Daerah														
		4.04.4.04.07.01	Badan Pendapatan Daerah														
		4.04.4.04.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
		4.04.4.04.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	24%													
		4.04.4.04.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87%													
		4.04.4.04.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	99%													
		4.04.4.04.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99%													
		4.04.4.04.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	91%													
		4.04.4.04.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26%													
		4.04.4.04.07.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	29%													
		4.04.4.04.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0%													
		4.04.4.04.07.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	73%													
		4.04.4.04.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	16%													
		4.04.4.04.07.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87%													
		4.04.4.04.07.01.01.23	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	84%													
		4.04.4.04.07.01.01.27	Festival Purwakarta Istimewa	100%													
		4.04.4.04.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
		4.04.4.04.07.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0%													
		4.04.4.04.07.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	68%													
		4.04.4.04.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	99%													
		4.04.4.04.07.01.02.10	Pengadaan mebeleur	99%													
		4.04.4.04.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99%													
		4.04.4.04.07.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	36%													
		4.04.4.04.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63%													
		4.04.4.04.07.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	58%													
		4.04.4.04.07.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0%													
		4.04.4.04.07.01.02.49	Pengadaan Peralatan Pusat Data (Data Center)	100%													
		4.04.4.04.07.01.02.50	Pengadaan perlengkapan mesin cetak/printer	99%													
		4.04.4.04.07.01.02.51	Pengadaan jasa sewa gedung kantor	77%													
		4.04.4.04.07.01.02.52	Pengadaan jasa Pemeliharaan LAN, Server Database dan Server Storage	0%													
		4.04.4.04.07.01.02.53	Pengadaan jasa pembuatan website	0%													
		4.04.4.04.07.01.02.54	Pengadaan peralatan audio visual	0%													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		4.04.4.04.07.01.02.56	Penataan ruangan arsip		0%	100%											Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.57	Pengadaan Mesin Cetak (Line Matrix Printer)		0%	100%	185,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.58	Pengadaan mesin porforasi		0%	100%	125,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.60	Penataan Tempat Parkir Motor		0%	100%	100,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.61	Penataan Emplasemen Gedung Kantor		0%	100%	250,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.62	Pengadaan Videotron		0%	100%	200,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.63	Penyediaan Peralatan Perengkapan Kantor		0%	100%	75,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.64	Penataan Ruang Tunggu Outdoor		0%	100%	180,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.65	Penataan Ruang Laktasi		0%	100%	120,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.66	Pengadaan Souvenir		0%	100%	150,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.68	Pengadaan Display Multimedia Informasi		0%	100%	125,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.02.70	Pembuatan Video Informasi dan Konten Multimedia		0%	100%	100,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				200,000,000												
		4.04.4.04.07.01.05.06	Peningkatan Kapasitas Pegawai		0%	100%	200,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				155,000,000												
		4.04.4.04.07.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		20%	100%	55,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah		70%	100%	30,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.06.07	Penataan Arsip		41%	100%	70,000,000										Sekretariat	Kabupaten Purwakarta	
		4.04.4.04.07.01.17	Program intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				6,145,200,000												
Tujuan 2: Peningkatan Penerimaan PAD		4.04.4.04.07.01.17.02	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB		0%	100%	125,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
	Sasaran 2.1: Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	4.04.4.04.07.01.17.03	Peningkatan pengawasan potensi pajak wajib pajak daerah Non PBB dan BPHTB (Uji Perik)		45%	80%	131,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.04	Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah Non PBB dan BPHTB		96%	90%	100,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.05	Pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB		100%	100%	100,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.06	Pemutakhiran data wajib pajak daerah Non PBB dan BPHTB		95%	100%	100,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.07	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMPATDA		99%	100%	70,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.08	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-SPTD		99%	100%	45,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.09	Pemelitian dan pemeriksaan lapangan pajak daerah Non PBB dan BPHTB		91%	100%	125,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.10	Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHTB		100%	100%	122,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.11	Peningkatan sarana pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHTB		94%	100%	145,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.12	Pendataan objek dan subjek pajak daerah Non PBB dan BPHTB		51%	100%	75,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.13	Apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak		0%	100%	175,000,000											Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.14	Pengelolaan pelayanan PBB dan validasi BPHTB		95%	100%	215,000,000											Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.15	Pencetakan masal SPPT dan DHKP PBB P2		94%	100%	114,000,000											Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta
		4.04.4.04.07.01.17.16	Pembinaan dan sosialisasi PBB dan BPHTB		82%	100%	230,000,000											Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		4.04.4.04.07.01.17.17	Pendataan dan Penilaian Objek Pajak, Verifikasi Data dan Penelitian Lapangan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	0%	0%	100%	265,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.19	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIP PBB	97%	97%	100%	50,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.20	Perakaman data obyek dan subyek pajak PBB P2	100%	100%	100%	165,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.21	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIP BPHTB	97%	97%	100%	50,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.22	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIP Arsip (Document Workflow) Pelayanan Pajak Daerah	0%	0%	100%	50,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.23	Evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah	0%	0%	100%	50,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.24	Peningkatan Kinerja Dana Bantuan Keuangan Provinsi	87%	87%	100%	75,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.25	Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	73%	73%	100%	1,073,200,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.28	Pengendalian dan pengawasan penyebaran SKPD	99%	99%	100%	50,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.29	Pengendalian dan pengawasan pengurangan, pembatalan dan keberatan pajak daerah	81%	81%	100%	50,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.30	Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah	0%	0%	100%	150,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.31	Pengadaan Aplikasi Dashboard Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	0%	0%	100%	125,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.32	Pengendalian penerimaan pendapatan retribusi daerah	0%	0%	100%	100,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.38	Pengadaan Aplikasi e-PBB	0%	0%	100%	45,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.39	Penyempurnaan ZMT / NIR PBB P2	67%	67%	100%	215,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.40	Pengadaan Aplikasi SIP MBLB	0%	0%	85%	100,000,000								Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.41	Optimalisasi Peningkatan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	0%	0%	75%	100,000,000								Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.42	Pengadaan Sarana Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Tapping Box)	0%	0%	80%	1,175,000,000								Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.44	Pengadaan Aplikasi SMS Gateway BPHTB	0%	0%	75%	50,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.45	Pengembangan Application Program Interface (API) PBB dan BPHTB	0%	0%	75%	75,000,000								Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.47	Pengadaan Aplikasi Penagihan	0%	0%	75%	130,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.17.48	Pengadaan Aplikasi Retribusi	0%	0%	75%	130,000,000								Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tujuan 1: Mewujudkan Manajemen Parkantoran secara optimal	Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Parkantoran	4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	100%		12,171,540,000	12,171,540,000	12,915,000,000	14,206,500,000	15,627,150,000	15,627,150,000	15,627,150,000	15,627,150,000	15,627,150,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Keuangan	100%	5,736,240,000	5,736,240,000	6,110,500,000	6,721,550,000	7,393,705,000	7,993,705,000	7,993,705,000	7,993,705,000	7,993,705,000	7,993,705,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	105,000,000	105,000,000	120,000,000	132,000,000	145,200,000	157,200,000	170,400,000	182,400,000	194,400,000	206,400,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	145,200,000	157,300,000	169,400,000	181,500,000	193,600,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	650,000,000	650,000,000	715,000,000	786,500,000	858,000,000	929,500,000	1,001,000,000	1,072,500,000	1,144,000,000	1,215,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	25,000,000	25,000,000	30,000,000	33,000,000	36,000,000	39,000,000	42,000,000	45,000,000	48,000,000	51,000,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	15,000,000	15,000,000	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000	30,000,000	32,000,000	34,000,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	30,000,000	30,000,000	55,000,000	60,500,000	66,000,000	71,500,000	77,000,000	82,500,000	88,000,000	93,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	50,000,000	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,000,000	71,500,000	77,000,000	82,500,000	88,000,000	93,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	190,000,000	190,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	217,800,000	235,950,000	254,100,000	272,250,000	290,400,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	85,000,000	93,500,000	102,000,000	110,500,000	119,000,000	127,500,000	136,000,000	144,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	85,000,000	93,500,000	102,000,000	110,500,000	119,000,000	127,500,000	136,000,000	144,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	550,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	726,000,000	786,500,000	847,000,000	907,500,000	968,000,000	1,028,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	200,000,000	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	290,400,000	314,600,000	338,800,000	363,000,000	387,200,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	200,000,000	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	290,400,000	314,600,000	338,800,000	363,000,000	387,200,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	145,200,000	157,300,000	169,400,000	181,500,000	193,600,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	55,000,000	55,000,000	60,500,000	66,000,000	71,500,000	77,000,000	82,500,000	88,000,000	93,500,000	99,000,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	85,000,000	93,500,000	102,000,000	110,500,000	119,000,000	127,500,000	136,000,000	144,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	150,000,000	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	217,800,000	235,950,000	254,100,000	272,250,000	290,400,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	200,000,000	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	290,400,000	314,600,000	338,800,000	363,000,000	387,200,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	25,000,000	25,000,000	30,000,000	33,000,000	36,000,000	39,000,000	42,000,000	45,000,000	48,000,000	51,000,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	145,200,000	157,300,000	169,400,000	181,500,000	193,600,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
		4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	50,000,000	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,000,000	71,500,000	77,000,000	82,500,000	88,000,000	93,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta			
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	140,000,000	140,000,000	154,000,000	169,400,000	185,800,000	202,200,000	218,600,000	235,000,000	251,400,000	267,800,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	185,000,000	185,000,000	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	290,400,000	314,600,000	338,800,000	363,000,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	50,000,000	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,000,000	71,500,000	77,000,000	82,500,000	88,000,000	93,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	15,000,000	15,000,000	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,780,000	23,595,000	25,410,000	27,225,000	29,040,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	82,500,000	90,750,000	99,825,000	109,900,000	120,000,000	130,100,000	140,200,000	150,300,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	35,000,000	35,000,000	42,350,000	46,585,000	50,820,000	55,055,000	59,290,000	63,525,000	67,760,000	72,000,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	50,000,000	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,000,000	71,500,000	77,000,000	82,500,000	88,000,000	93,500,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					
4.04	Badan Pendapatan Daerah	100%	140,000,000	140,000,000	154,000,000	169,400,000	185,800,000	202,200,000	218,600,000	235,000,000	251,400,000	267,800,000	Sekretariat	Kabupaten Purwakarta					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tujuan 2: Peningkatan Penerimaan PAD	Sasaran 2.1: Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	4.04.4.04.07.01.07.112	Penyusunan rencana kerja SKPD	100%	0%	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.985.000	100%	19.985.000	Kabupaten Purwakarta			
		4.04.4.04.07.01.07.113	Promosi Asuransi Pegawai Nhon PMS	100%	0%	100%	78.240.000	100%	86.000.000	100%	94.600.000	100%	104.060.000	100%	104.060.000	Kabupaten Purwakarta			
		4.04.4.04.07.01.07.114	Penyediaan Jasa Pliet	100%	0%	100%	105.000.000	100%	115.500.000	100%	127.050.000	100%	139.755.000	100%	139.755.000	Kabupaten Purwakarta			
		4.04.4.04.07.01.07.115	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	100%	0%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	66.550.000	Kabupaten Purwakarta			
		4.04.4.04.07.01.20	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHBT				1.990.000.000		2.024.000.000		2.226.400.000		2.449.040.000		2.449.040.000				
		4.04.4.04.07.01.20.01	Optimalisasi Peningkatan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHBT	10%	0%	10%	100.000.000	80%	110.000.000	85%	121.000.000	90%	133.100.000	90%	133.100.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.02	Peningkatan pengawasan potensi pajak wajib pajak daerah Non PBB dan BPHBT (Uji Petik)	10%	45%	10%	75.000.000	85%	82.500.000	90%	90.750.000	95%	99.825.000	95%	99.825.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.03	Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah Non PBB dan BPHBT	10%	96%	10%	100.000.000	90%	110.000.000	95%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	133.100.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.04	Pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHBT	10%	100%	10%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	133.100.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.05	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB dan BPHBT	10%	0%	10%	125.000.000	100%	137.500.000	100%	151.250.000	100%	166.375.000	100%	166.375.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.06	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHBT	10%	0%	10%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	133.100.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.07	Pengembangan Application Program Interface (API) Non PBB dan BPHBT	10%	0%	10%	150.000.000	85%	165.000.000	90%	181.500.000	95%	199.650.000	95%	199.650.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.08	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah dan BPHBT	10%	0%	10%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	199.650.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.09	Pendataan objek dan subjek pajak daerah Non PBB dan BPHBT	10%	91%	10%	75.000.000	83%	82.500.000	90%	90.750.000	95%	99.825.000	95%	99.825.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.20.10	Pemutakhiran data wajib pajak daerah Non PBB dan BPHBT	10%	95%	10%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	133.100.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta		
4.04.4.04.07.01.20.11	Pengadaan Sarana Monitoring Penerimaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHBT	10%	0%	10%	175.000.000	85%	192.500.000	90%	211.750.000	95%	232.925.000	95%	232.925.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta				
4.04.4.04.07.01.20.12	Penelitian dan pemeriksaan lapangan pajak daerah Non PBB dan BPHBT	10%	91%	10%	125.000.000	100%	137.500.000	100%	151.250.000	100%	166.375.000	100%	166.375.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta				
4.04.4.04.07.01.20.13	Stimulus Peningkatan Layanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHBT	10%	0%	10%	100.000.000	70%	110.000.000	75%	121.000.000	80%	133.100.000	80%	133.100.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta				
4.04.4.04.07.01.20.14	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-SPPFD	10%	99%	10%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	59.895.000	100%	59.895.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta				
4.04.4.04.07.01.20.15	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMPATDA	10%	99%	10%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	84.700.000	100%	93.170.000	100%	93.170.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta				
4.04.4.04.07.01.20.16	Pengadaan Aplikasi SIP Air tanah dan POS (Payment On Sales)	10%	0%	10%	150.000.000	0%		0%		0%		0%							
4.04.4.04.07.01.20.17	Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHBT	10%	0%	10%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	199.650.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta				
4.04.4.04.07.01.20.18	Peningkatan sarana pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHBT	10%	94%	10%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	133.100.000	Bidang Pendapatan I	Kabupaten Purwakarta				
Sasaran 2.2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Sasaran 2.2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	4.04.4.04.07.01.21	Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHBT				1.975.800.000		2.172.000.000		2.389.200.000		2.628.120.000		2.628.120.000				
		4.04.4.04.07.01.21.01	Kegiatan Pencetakan Masal SPPT dan DHKP PBB P2	10%	94%	10%	137.000.000	100%	145.700.000	100%	156.720.000	100%	175.692.000	100%	175.692.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.21.02	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHBT	10%	93%	10%	215.000.000	100%	236.500.000	100%	260.150.000	100%	286.165.000	100%	286.165.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.21.03	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi PBB	10%	82%	10%	125.000.000	100%	137.500.000	100%	151.250.000	100%	166.375.000	100%	166.375.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.21.04	Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan PBB dan BPHBT	10%	82%	10%	130.000.000	100%	143.000.000	100%	157.300.000	100%	173.030.000	100%	173.030.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.21.05	Kegiatan Peningkatan dan Penilaian Subyek dan Objek Pajak PBB P2	10%	0%	10%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	399.300.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.21.07	Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Permasalahan PBB P2 dan BPHBT	10%	0%	10%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	266.200.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.21.08	Kegiatan Perakaman Data Objek dan Subyek Pajak PBB P2	10%	0%	10%	153.800.000	100%	170.000.000	100%	187.000.000	100%	205.700.000	100%	205.700.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		
		4.04.4.04.07.01.21.09	Kegiatan Perakaman Data Objek dan Subyek Pajak PBB P2	10%	100%	10%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	266.200.000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 21 - 10	Kegiatan Penyusunan Nilai Pasar Tanah	10%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-			
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 21 - 11	Pemetaan Subjek dan Objek PBB P2 Melalui Sistem GIS	10%	100%	518.000,000	100%	569.800,000	100%	626.780,000	100%	689.458,000	100%	689.458,000	100%	689.458,000	Bidang Pendapatan II	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22	Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah	10%	100%	2.471.500,000	100%	2.608.500,000	100%	2.869.350,000	100%	3.156.285,000	100%	3.156.285,000	100%	3.156.285,000			
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 01	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	10%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 02	Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	10%	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000	100%	266,200,000	100%	266,200,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 03	Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak	10%	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363,000,000	100%	399,300,000	100%	399,300,000	100%	399,300,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 04	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	10%	100%	1,246,500,000	100%	1,371,000,000	100%	1,508,100,000	100%	1,658,910,000	100%	1,658,910,000	100%	1,658,910,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 05	Peningkatan Kinerja Dana Bantuan Keuangan Provinsi	10%	100%	75,000,000	100%	82,500,000	100%	90,750,000	100%	99,825,000	100%	99,825,000	100%	99,825,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 07	Pengendalian Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	10%	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	181,500,000	100%	199,650,000	100%	199,650,000	100%	199,650,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 08	Pengendalian dan Pengawasan Penyebaran SKPD	10%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 09	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Dashboard	10%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 10	Realisasi Penerimaan	10%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	
		4.04 - 4.04.07 - 01 - 22 - 12	Pengadaan Aplikasi Retribusi	10%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	100%	133,100,000	Bidang Penagihan	Kabupaten Purwakarta	



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai koordinator pendapatan daerah mempunyai peran strategis dalam mewujudkan visi misi dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018-2023.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan rencana strategis dan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta antara lain:

Misi Pertama, yaitu Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan *clean government and good governance* melalui pencapaian indikator kepuasan pelayanan pajak daerah, proposi Standar Operational Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terhadap kebutuhan, proposi penyelenggaraan layanan terhadap SOP dan SP.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan transparansi dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan pajak daerah. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan birokrasi yang transparan dan professional sehingga mampu meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan proporsi peningkatan pencapaian realisasi PAD terhadap target, proporsi pendapatan pajak daerah terhadap PAD, serta optimalisasi penagihan piutang pajak daerah.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023
MATRIK INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	SASARAN					PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1	Tercapainya target penerimaan semua jenis pendapatan pajak daerah	1	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Jumlah Pajak daerah dibagi Jumlah PAD dikali 100% 100	60,00	72,50	- Sekretariat - Bidang Pendapatan I - Bidang Pendapatan II - Bidang Penagihan
		2	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan Daerah dikali 100%	17,87	20,00	
2	Meningkatnya kepuasan WP dalam pelayanan pembayaran pajak daerah	1	WP yang puas terhadap pelayanan pembayaran pajak daerah	Nilai	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	0,00	78,00	- Sekretariat - Bidang Pendapatan I - Bidang Pendapatan II - Bidang Penagihan
		2	Pengaduan WP dalam pelayanan pajak daerah	%	Prosentase pengaduan WP yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan WP yang diterima dikali 100%	80,00	100,00	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP Badan	Nilai	Hasil Evaluasi Inspektorat	0,00	80,00	- Sekretariat - Bidang Pendapatan I - Bidang Pendapatan II - Bidang Penagihan
		2	Tindak lanjut rekomendasi BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kota	%	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100%	90,00	100,00	



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BADAN PENDAPATAN DAERAH ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap bidang, sub bidang dan staf Badan Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (*Renja-Badan Pendapatan Daerah*).
2. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai rumusan untuk penguatan peran (fungsi) para stakeholder/pelaku dalam pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dijadikan dasar untuk evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah.

Semoga Renstra Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan mampu memenuhi fungsinya sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk masa yang akan datang



dengan tetap berupaya memperbaiki kinerja yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.